

DESEMBER 2024

MAJALAH JDIH KAB MAGELANG

JARINGAN
DOKUMENTASI
DAN
INFORMASI
HUKUM



Baca E-Majalah JDIH Kab Magelang
MELALUI GAWAI KAMU
SEKARANG!

EDISI
01



Motto

**“Lengkap,
Akurat,
Mudah,
Cepat”**

Salam JDIH

Ratna Yulianty, S.H., M.H.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

1. Pimpinan Redaksi : Ratna Yulianty, S.H., M.H.
2. Wakil Pimpinan Redaksi : Ruswanto, S.H
3. Dokumentasi : M. Yuranda Bakda Maulana, S.Kom
4. Editor / Ilustrator : Nasrul Amin, S.I.Pust
5. Staf Redaksi : Roro Subekti, S.I.Pust
Nasrul Amin, S.I.Pust
M. Yuranda Bakda Maulana, S.Kom



SALAM REDAKSI

Assalamualikum Wr.Wb, Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnyamajalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Magelang edisi pertama yang diluncurkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang di tahun 2024. Majalah ini merupakan sarana informasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang berbagai kebijakan, kegiatan, rencana dan Realisasi dari program - program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terutama berkaitan tentang hukum meliputi perundang-undangan, perlindungan dan bantuan hukum serta penyebarluasan produk hukum Daerah yang telah diterbitkan seperti peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati instruksi bupati dan keputusan sekretariat daerah yang bisa diakses dan ditemukan oleh perangkat daerah dan masyarakat di kabupaten Magelang khususnya serta di Indonesia pada umumnya.

Majalah ini juga menyajikan berbagai macam informasi yang sangat bermanfaat antara lain kegiatan atau program yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Magelang, Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas, layanan publik dari bagian hukum yang diberikan kepada perangkat daerah dan masyarakat, rangkuman berita tahun 2024, inovasi bagian hukum, resensi buku, dan lain sebagainya yang dapat memberikan wawasan sekaligus transparansi kepada masyarakat tentang semua hal yang terjadi di lingkungan Kabupaten Magelang. Tak lupa kami mengharapkan saran, masukan dan kritik dari para pembaca agar pengembangan majalah ini bisa menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menyajikan sesuatu yang berkualitas dan berintegritas di kemudian hari.

Demikian kata pengantar dari Redaksi yang bisa kami sampaikan, besar harapan kami, majalah ini bisa menjadi wadah informasi yang baik dan bermutu sehingga bisa berkontribusi bagi kemajuan pembangunan di bidang hukum baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Sekian dan terima kasih

Kota Mungkid, Desember 2024
Hormat Kami,
Redaksi Majalah JDIH Kabupaten Magelang



- 01** | **INFO LAYANAN**
Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang
- 02** | **BERITA**
Penghargaan JDIH Tingkat Jawa Tengah 2024
- 04** | **BERITA**
Penghargaan JDIHN Tingkat Nasional 2024
- 06** | **BERITA**
Penghargaan Abdi Praja Award 2024
- 08** | **KEGIATAN**
Sosialisasi Peraturan Daerah 2024
- 11** | **KEGIATAN**
Konsultasi Publik Kajian Evaluasi Peraturan Daerah 2024
- 13** | **KEGIATAN**
Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Desa 2024
- 15** | **KEGIATAN**
Pertemuan Berkala III, Petugas Pengelola JDIH Kabupaten Magelang 2024
- 18** | **KEGIATAN**
Studi Komparasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang 2024
- 20** | **KEGIATAN**
Kegiatan Sosialisasi Paralegal Justice Award & Wiloka Legal Culture 2024

- 22** | **BERITA**
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM 2024
- 24** | **RESENSI**
Buku “SOGOK AKU KAU KUTANGKAP”
- 25** | **RESENSI**
Buku “Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja”
- 26** | **TOKOH**
Artidjo, Sang Pendekar Hukum
- 28** | **KEGIATAN**
Konsultasi Publik Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- 30** | **BERITA**
Penghargaan Paralegal Justice Award Kades Somokaton, Kab. Magelang
- 32** | **KEGIATAN**
Pembinaan Desa Sadar Hukum Perlu diperluas lagi
- 34** | **KEGIATAN**
Penguatan Sinergitas Perangkat Daerah di Bidang Hukum
- 36** | **KEGIATAN**
Pembahasan Tiga Raparda untuk Pembangunan Daerah
- 38** | **KEGIATAN**
RP3KP untuk Rencana Pembangunan, Perumahan dan Permukiman

LAYANAN PUBLIK

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG

ERITA - DOKUMEN HUKUM - APLIKASI TERKAIT -



OLC
Online Legal
Consultation
Konsultasi Hukum Online



SI UNAN DUKUH
Sistem Informasi Penyusunan Produk Hukum Daerah



OPAC
Online Public Access Catalog
Perpustakaan Online JDIIH Kab. Magelang



Google Play

APLIKASI ANDROID JDIIH KABUPATEN MAGELANG



JDIIH KABUPATEN MAGELANG MOBILE
Halo Masyarakat Magelang!
Aplikasi Android JDIIH Kabupaten Magelang kini hadir dalam versi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen hukum dan informasi hukum di Kabupaten Magelang.

AYO DOWNLOAD SEKARANG JUGA!



KANTOR
BAGIAN
HUKUM



KLINIK HUKUM
KABUPATEN MAGELANG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RAIH PENGHARGAAN JDIH TERBAIK TINGKAT PROPINSI JAWA TENGAH

Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bagian Hukum kembali meraih penghargaan sebagai salah satu pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik di Jawa Tengah. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana kepada Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto pada acara Rapat Koordinasi Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola wadah pendayagunaan dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, penghargaan ini juga mengakui upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Penghargaan JDIH Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024 ini melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik ke 4, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024. Hasil yang patut diapresiasi karena penghargaan yang bergengsi ini merupakan kristalisasi jerih payah dan dukungan semua pihak dan akan berupaya lebih baik lagi untuk bisa meningkatkan kualitas dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang, dengan tujuan agar masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kebutuhan produk hukum di Kabupaten Magelang bisa terpenuhi dan diharapkan juga bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik lagi di ajang berikutnya.

Oleh karena itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk selalu melangkah lebih maju dan siap untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pegawainya.



“Untuk mengelola JDIH menjadi optimal dan berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia di atas rata-rata”

JONNY PESTA SIMAMORA, S.I.P., M.Si.
Kepala Pusat JDIHN



“Tentunya ini menjadi tantangan kita ke depan untuk menjadi lebih baik lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Intinya teman-teman dari jajaran Bagian Hukum harus tetap semangat, Prestasi yang sudah baik ini harus dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi”

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.
Pj. Bupati Kabupaten Magelang



“Pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat ini bisa diberikan kepada rekan-rekan OPD, Pemerintah Desa, dan juga kepada masyarakat. Ratna juga menambahkan bahwa Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang telah memiliki perpustakaan mengenai informasi pelayanan di bidang hukum dan mengoptimalkan website untuk lebih mempermudah dalam memberikan informasi di bidang hukum. kan lagi”

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RAIH PENGHARGAAN JDIH TERBAIK NASIONAL UNTUK KETIGA KALINYA

Pemerintah Kabupaten Magelang kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan JDIHN Awards 2024 Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) Terbaik Nasional Kategori Kabupaten dalam ajang Pertemuan Nasional Pengelola JDih Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut, setelah sebelumnya diraih pada tahun 2022 dan 2023. Prestasi ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. JDIHN Awards merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini diberikan kepada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga negara nonstruktural, pemerintah daerah, sekretariat DPRD, dan perguruan tinggi yang telah berkontribusi signifikan dalam pengembangan dan penyebarluasan informasi hukum berkualitas. Tahun ini, tema yang diusung adalah "JDihn Berkualitas Tingkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."



Penghargaan JDIHN Awards 2024 diserahkan oleh Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, kepada Staf Ahli Bupati Magelang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, Azis Amin Mujahidin yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, dalam acara yang berlangsung di Aston Kartika Grogol Hotel dan Conference Center, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024).

Penghargaan JDIHN Awards 2024 kali ini melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berhasil meraih

penghargaan sebagai Terbaik ke 7 (Tujuh) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kategori Kabupaten Tahun 2024. Pencapaian yang patut dibanggakan bisa meraih penghargaan yang bergengsi ini. Dengan keterbatasan fasilitas yang ada, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang masih bisa bertahan di deretan 10 besar dari sekian banyak Kabupaten di Indonesia.



“JDIHN mengubah cara birokrasi pemerintah bekerja, dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis internet, yang mempermudah akses penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami berharap prestasi yang dicapai oleh pengelola JDIH dapat selalu meningkat setiap tahunnya dan menjadi inspirasi bagi anggota JDIHN lainnya”

PROF. DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)



“Terima kasih kepada seluruh staf di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dan semua pihak yang telah berperan dalam keberhasilan ini. Semoga JDIH Kabupaten Magelang semakin bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat”

AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd
Staf Ahli Bupati Magelang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia





9 DESEMBER 2024

Penghargaan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

RAIH JUARA DI ABDI PRAJA AWARD PADA AJANG JAGAD SEMAR 2024

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang kembali mencatat prestasi gemilang dalam ajang JAGAD SEMAR (Ajang Penghargaan Inovasi Daerah dan Semarak Seminar Tahun 2024) dengan meraih Juara ke-2 kategori Abdi Praja Award. Penghargaan ini adalah ajang apresiasi untuk perangkat daerah di Kabupaten Magelang yang memberikan kontribusi dalam menciptakan inovasi yang berguna dalam memberikan manfaat baik dalam lingkup kecil (perangkat daerah) atau lingkup besar (masyarakat) di Kabupaten Magelang. Melalui inovasi yang diajukan yaitu "JDIH Android" dengan tagline

"Hukum dalam Genggaman"

menjadi kunci keberhasilan yang membawa penghargaan bergengsi ini. Ajang JAGAD SEMAR 2024 merupakan puncak dari tiga lomba inovasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Magelang sepanjang tahun ini diantaranya Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA), Lomba Gemilang Innovation Award, dan Lomba Abdi Praja Award. Acara ini dibuka dan disambut langsung oleh Pj. Bupati Kabupaten Magelang, Sepyo Achanto, S.H., M.H. Beliau menekankan arti penting penciptaan inovasi daerah karena dapat meningkatkan layanan yang prima bagi semua kalangan di Kabupaten Magelang.



"Acara ini merupakan wadah penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi di semua sektor. Saya berharap lomba inovasi seperti ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan sehingga menjangkau kalangan yang lebih luas,"

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.
Pj. Bupati Kabupaten Magelang



Tak lupa Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang juga memberikan tanggapannya tentang penghargaan yang telah diraih dari perangkat daerah yang dipimpinnya



"Kami tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Kami akan terus mengembangkan inovasi layanan hukum kami agar akses masyarakat terhadap kebutuhan produk hukum dan informasi hukum semakin mudah dan cepat,"

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, M. Taufiq Hidayat Yahya, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi daerah dimana setiap tahunnya diwajibkan untuk mengajukan satu inovasi, maka butuh sekali komitmen dari semua perangkat daerah untuk mewujudkannya.



"Salah satu amanat peraturan ini adalah bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki minimal satu inovasi setiap tahun. Hal ini menjadi dasar penting untuk terus menciptakan terobosan-terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat."

M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.
Kepala Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Bagian Hukum Kabupaten Magelang dalam memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Magelang terkait penyediaan kebutuhan produk dan informasi hukum agar semakin mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Sekaligus Bagian Hukum akan terus bertekad untuk selalu menghadirkan inovasi yang cemerlang di setiap tahunnya agar terwujud Kabupaten Magelang yang maju, cerdas, unggul dan berdaya saing.



Kunjungan Pj Bupati Kabupaten Magelang ke Stand Inovasi Daerah Bagian Hukum Setda Kab. Magelang

PENTINGNYA PERATURAN DAERAH UNTUK DISOSIALISASIKAN



Kegiatan sosialisasi peraturan daerah merupakan suatu langkah penting yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyebarkan peraturan yang telah dibuat kepada perangkat daerah dan masyarakat di suatu wilayah. Sosialisasi ini memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang telah disahkan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam implementasinya. Dalam banyak kasus, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak selalu langsung dipahami atau diterima oleh semua pihak, baik itu oleh aparat pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi penting sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang jelas, komprehensif, dan mudah dipahami mengenai isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Kegiatan sosialisasi ini rutin diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperbarui informasi kepada masyarakat serta perangkat daerah mengenai peraturan daerah yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti peraturan yang ada dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang, yang memiliki peran kunci dalam memastikan agar kegiatan berjalan dengan lancar dan efisien. Bagian Hukum bertanggung jawab dalam merancang materi sosialisasi yang disampaikan kepada audiens, serta menyediakan berbagai dokumen yang diperlukan untuk mempermudah pemahaman terhadap peraturan daerah yang dibahas.

Dalam pelaksanaan sosialisasi, Bagian Hukum juga memiliki peran dalam memilih narasumber yang tepat dan memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan daerah yang akan disosialisasikan. Fasilitasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum ini meliputi pengaturan tempat dan waktu kegiatan, pemilihan alat bantu presentasi, serta memastikan agar audiens dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tak hanya itu, Bagian Hukum juga bertanggung jawab dalam menyusun jadwal yang tepat agar kegiatan ini dapat dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang berpotensi terdampak langsung oleh peraturan yang dibahas. Dengan fasilitasi yang optimal, diharapkan kegiatan sosialisasi dapat berlangsung secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah



Salah satu komponen penting dalam kegiatan sosialisasi ini adalah narasumber yang dihadirkan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada audiens mengenai isi peraturan daerah yang akan disosialisasikan. Dalam hal ini, narasumber berasal dari DPRD Kabupaten Magelang, yang memiliki peran sentral dalam proses pembuatan dan pengesahan peraturan daerah. Anggota DPRD memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan yang telah disahkan dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai isi, tujuan, serta implikasi dari peraturan tersebut terhadap masyarakat. Para narasumber ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi yang sangat teknis dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens, baik itu perangkat daerah maupun masyarakat yang tidak memiliki latar belakang hukum. Narasumber juga memberikan wawasan mengenai bagaimana peraturan daerah ini seharusnya diterapkan di lapangan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dengan adanya narasumber yang kompeten, kegiatan sosialisasi peraturan daerah akan lebih efektif dalam memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi audiens.

Setiap peraturan daerah memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, seperti mengatur pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik yang lebih efektif. Namun, tanpa adanya pemahaman yang baik tentang peraturan tersebut, masyarakat bisa saja tidak mematuhi aturan yang ada karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman sedangkan

manfaat dari kegiatan sosialisasi ini sangat besar, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah daerah. Bagi masyarakat, sosialisasi ini memberikan kesempatan untuk mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka terkait dengan peraturan daerah yang berlaku. Masyarakat yang memahami peraturan akan lebih cenderung mematuhi, sehingga bisa menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan harmonis. Selain itu, sosialisasi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dengan memberikan masukan atau kritik yang konstruktif terkait dengan peraturan daerah. Bagi pemerintah daerah, sosialisasi ini juga menjadi cara untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat terkait dengan peraturan yang telah diterapkan. Hal ini sangat berguna dalam mengevaluasi efektivitas dari peraturan tersebut, serta mengetahui apakah peraturan tersebut masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat atau perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, kualitas peraturan daerah dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.



Salah satu elemen penting yang juga tidak kalah penting dalam kegiatan sosialisasi adalah kesempatan yang diberikan kepada audiens untuk bertanya jawab. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, audiens diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan daerah yang sedang dibahas. Sesi tanya jawab ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada audiens untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang masih belum jelas atau membingungkan terkait peraturan tersebut. Masyarakat yang mungkin belum memahami beberapa ketentuan atau pasal dalam peraturan daerah dapat langsung bertanya kepada narasumber, yang akan memberikan penjelasan secara rinci dan mudah dipahami. Sesi ini juga memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya terhadap peraturan daerah yang sedang disosialisasikan, yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan peraturan yang lebih baik di masa depan. Dengan adanya tanya jawab, peserta sosialisasi merasa lebih terlibat dalam proses, dan ini akan semakin memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.



PERATURAN DAERAH LAMA PERLU DIKAJI DAN DIEVALUASI

Acara konsultasi publik merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas regulasi di daerah tersebut. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama yang erat dengan Tim Ahli Analis Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah, serta perangkat daerah yang mengampu peraturan daerah (Perda) yang menjadi fokus dalam acara tersebut. Mengingat bahwa usia beberapa Perda sudah melebihi ketentuan yang berlaku dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, evaluasi yang cermat sangat diperlukan untuk memastikan peraturan tersebut tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan industri di Kabupaten Magelang.

Peserta yang hadir dalam konsultasi publik ini merupakan gabungan dari berbagai unsur masyarakat, yang mencakup perwakilan perangkat daerah, kecamatan, perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Partisipasi dari berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan peraturan daerah yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan pemerintah, tetapi juga dapat memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat luas. Diskusi yang berlangsung tidak hanya terbatas pada paparan dari narasumber, tetapi juga mencakup sesi tanya jawab dan diskusi aktif untuk menggali ide-ide konstruktif dari semua peserta yang hadir. Dengan adanya beragam perspektif ini, diharapkan akan tercipta sebuah Perda yang lebih baik dan sesuai dengan dinamika yang ada di Kabupaten Magelang.

Salah satu tujuan utama dari konsultasi publik ini adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan yang konstruktif. Hal ini penting untuk menciptakan peraturan daerah yang lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi, serta mampu mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Masyarakat, yang merupakan subjek langsung dari peraturan daerah, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, setiap masukan yang diberikan dalam konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam penyempurnaan regulasi yang ada serta menjadikannya lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya merupakan elemen kunci dalam keberhasilan kegiatan konsultasi publik ini. Tanpa adanya kontribusi yang signifikan dari masyarakat, maka penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah akan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam evaluasi dan perbaikan peraturan daerah. Dengan cara ini, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya akan lebih baik, tetapi juga lebih mudah diterima oleh masyarakat karena proses penyusunannya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut.



Ke depan, pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat lebih giat dalam mengadakan konsultasi publik semacam ini untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan daerah yang ada. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan, diharapkan Kabupaten Magelang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebagai kesimpulan, kegiatan konsultasi publik ini bukan hanya sekedar forum untuk mendiskusikan peraturan daerah, tetapi juga menjadi wadah bagi terwujudnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik, lebih adaptif, dan lebih bermanfaat bagi semua pihak.



Bimbingan Teknis Desa dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

GELAR BIMTEK PENGELOLAAN JDIH BAGI 66 DESA PILOT PROJECT

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Desa, yang berlangsung di Ruang Perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Pilot Project Tahun 2024 dan dihadiri oleh perwakilan dari 66 desa yang terpilih. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH di tingkat desa. Para peserta yang hadir adalah operator website desa atau Sistem Informasi Desa yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengunggah dokumen hukum desa. Pada sesi ini, materi yang diberikan mencakup persiapan file salinan produk hukum desa dan tata cara unggah produk hukum tersebut ke website desa.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat terutama di desa dapat mengetahui dan mencari dengan mudah produk hukum desa yang sudah diterbitkan dan up-to-date sehingga terjadi transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada khalayak yang akan meningkatkan kepercayaan publik



“Dengan adanya pengelolaan JDIH yang baik di tingkat desa, masyarakat dapat mendapatkan informasi hukum dengan lebih cepat dan akurat. Ini akan membantu mereka dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta mendukung penegakan hukum di tingkat desa,”

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang



Adapun produk hukum desa yang diunggah ke portal website desa antara lain

1. Peraturan Desa,
2. Keputusan Kepala Desa
3. Peraturan kepala desa,
4. Peraturan bersama kepala desa

Dalam Kegiatan Bimtek desa kali ini, diikuti oleh beberapa pemerintah desa di Kabupaten Magelang yang diundang secara bertahap. Kemudian pelaksanaannya dipandu oleh personil dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang akan memberikan pengarahan dan penjelasan terkait cara teknis pengisian produk hukum desa yang akan di portal website desa masing-masing sesuai dengan metadata yang tersedia.

Manfaat yang ditarget dalam bimbingan teknis desa ini adalah pemerintah desa dapat mengupload secara mandiri sekaligus dapat mengelola produk hukum desanya sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 yang menjadi standar pengisian metadata dari produk hukum desa tersebut.



MENINGKATKAN DAN MEMBANGUN SINERGITAS DAN KEBERSAMAAN



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sukses menggelar Pertemuan Berkala III bagi Petugas Pengelola JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Perangkat Daerah se-Kabupaten Magelang. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (13/11/2024) yang menjadi kegiatan penutup untuk rangkaian Pertemuan Berkala di tahun 2024. Dengan Mengusung tema “Building Togetherness” atau Membangun Kebersamaan, kegiatan ini bertujuan untuk semakin mempererat hubungan antar petugas JDIH di setiap perangkat daerah, serta meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, S.H., M.H dengan memberikan pesan dan harapan yang disampaikan kepada petugas pengelola JDIH Kabupaten Magelang agar meningkatkan sinergitas dan keharmonisan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bambang Hermanto, S.STP. yang memberikan sambutan hangat kepada seluruh petugas yang hadir. Dalam arahannya, Bambang mengingatkan pentingnya peran JDIH dalam menyediakan produk hukum daerah yang mudah diakses oleh masyarakat. Beliau berharap, dengan adanya pertemuan ini, kinerja petugas JDIH dapat lebih ditingkatkan, sehingga pelayanan terkait produk hukum di Kabupaten Magelang dapat lebih optimal dan efisien.



"Melalui pertemuan ini, saya berharap seluruh petugas JDIH dapat semakin solid dan bekerja sama untuk menjadikan layanan informasi hukum di Kabupaten Magelang lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat. Kebersamaan adalah kunci utama untuk mencapainya,"

BAMBANG HERMANTO, S.STP.
 Asisten Pemerintahan dan Kesra



"Kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis diantara petugas JDIH di Kabupaten Magelang serta Sinergi yang kuat antar petugas akan membuat kita lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat"

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang

Setelah pembukaan, kegiatan pertemuan berkala III dilanjutkan dengan kunjungan bersama menggunakan mobil VW Safari sambil melihat keindahan panorama yang disajikan di setiap sudut jalan dan dilanjutkan dengan melihat lebih dekat tentang perkembangan dan Kemajuan UMKM lokal di sekitar Kabupaten Magelang yang terletak di daerah sekitar Borobudur, seperti industri Rengginang dan Budidaya Jamur.

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada petugas JDIH, tetapi juga untuk mempererat kebersamaan dalam suasana yang santai dan menyenangkan. setiba di industri rengginang, para peserta kegiatan pertemuan berkala III dengan antusias mempraktekan proses pembuatannya tetapi juga menikmati sajian minuman dan makanan khas yang disediakan di sentra tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan para petugas tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka tentang produk hukum, tetapi juga mendapatkan inspirasi untuk lebih mengembangkan potensi daerah dalam bidang lain.





Di penghujung acara, terdapat momen haru ketika para petugas JDIH mengucapkan salam perpisahan kepada salah satu petugas senior, Yuhibil Walad, yang akan segera memasuki masa purna tugas. Yuhibil, yang berasal dari Kecamatan Kaliangkrik, telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Magelang. Selama bertugas, beliau dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi. Kepergiannya tentu meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh rekan kerja di JDIH.



"Terima Kasih saya ucapkan atas perhatian, bimbingan dan kerjasama semua personil Pengelola JDIH di Kabupaten Magelang. Selalu jaga kekompakan, bangun keakraban, dan tali silaturahmi. Kegiatan yang sangat bermanfaat dan menyenangkan bisa berkumpul bersama teman semua."

YUHIBUL WALAD.
Petugas Pengelola JDIH Kecamatan Kaliangkrik

Dengan selesainya Pertemuan Berkala III ini, diharapkan para petugas JDIH Kabupaten Magelang semakin termotivasi untuk memberikan layanan hukum yang lebih baik, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kebersamaan yang telah terjalin dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut, memperkuat kinerja dan pelayanan JDIH, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Magelang yang lebih transparan dan akuntabel dalam hal dokumentasi dan informasi hukum. Dengan semangat yang terus terjaga, JDIH Kabupaten Magelang siap menghadapi tantangan ke depan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam hal pelayanan informasi hukum.

Kegiatan Studi Komparasi

LAKUKAN “STUDI BANDING” UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS



Studi komparasi merupakan salah satu metode strategis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dengan mengadopsi atau mereplikasi sistem yang telah terbukti efektif di daerah lain. Kegiatan ini melibatkan kunjungan kerja yang bertujuan untuk mempelajari proses dan inovasi yang diterapkan oleh bagian hukum di daerah yang memiliki sistem pengelolaan lebih maju. Melalui studi komparasi, para pelaksana dapat memperoleh wawasan baru tentang bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Adopsi atau replikasi sistem ini tidak hanya mencakup teknis pengelolaan, tetapi juga menyangkut budaya kerja dan inovasi yang telah diimplementasikan dengan baik.

Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun silaturahmi antara bagian hukum di berbagai daerah, sekaligus berbagi pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Silaturahmi ini memungkinkan terjalinnya kerja sama yang lebih kuat di masa depan, terutama dalam menangani isu-isu hukum yang bersifat lintas daerah. Melalui diskusi dan interaksi langsung, peserta studi komparasi dapat bertukar ide serta saling mendukung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hukum. Selain membangun hubungan antar lembaga, studi komparasi juga memberikan kesempatan untuk mengetahui inovasi-inovasi yang akan sedang atau sudah dilaksanakan oleh bagian hukum di daerah lain. Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari digitalisasi dokumen hukum, pengembangan aplikasi berbasis teknologi, hingga strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan memahami inovasi-inovasi tersebut, bagian hukum dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diadopsi untuk memperbaiki layanan hukum di daerah masing-masing. Selain itu, inovasi yang dipelajari juga dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan program baru yang lebih relevan dan bermanfaat. Sebagaimana yang sudah diciptakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa program inovasi seperti Aplikasi Si Sunan Dukuh, Online Legal Consultation (OLC), Aplikasi Android JDIH Kabupaten Magelang dan Website JDIH Kabupaten Magelang. Inovasi tersebut mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan Pengelolaan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang didalam melaksanakan tugas yang menjadi tupoksinya.

Sebagai bagian dari keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), studi komparasi juga menjadi salah satu kewajiban bagi setiap anggotanya. sebagaimana dikatakan perwakilan dari JDIHN bahwa Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi indikator penilaian JDIHN yang mengharuskan setiap anggota melakukan studi komparasi ke JDIH di daerah lain dengan kualitas pengelolaan yang lebih baik dengan kriteria peringkat anggota JDIHN yang dirilis melalui penghargaan JDIHN Award. Kegiatan tersebut minimal dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Studi komparasi juga menjadi alat evaluasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa bagian hukum di setiap daerah terus berkembang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti studi ini, anggota JDIHN tidak hanya dapat belajar dari pengalaman terbaik, tetapi juga dapat menyesuaikan strategi pengelolaan hukum mereka agar lebih efektif dan relevan.



IKUT SERTA CAMAT DAN KADES DALAM PARALEGAL JUSTICE AWARD & WILOKA LEGAL CULTURE



Berempat di Ruang Rapat Bina Karya, acara Sosialisasi Kegiatan Paralegal Justice Award dan Wiloka Legal Culture sukses diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dispermades, Kanwil Kemenkumham, Bagian Hukum, Camat se-Kabupaten Magelang, serta Kepala Desa/Lurah dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum. Kehadiran para peserta ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum di tingkat lokal melalui program-program yang terstruktur dan strategis

Acara yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Ratna Yulianty, S.H., M.H., ini bertujuan mempersiapkan partisipasi aktif seluruh pihak terkait dalam ajang Paralegal Justice Award Tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan peran masyarakat dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum di Kabupaten Magelang. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antarstakeholder dapat terjalin lebih baik demi menciptakan budaya hukum yang lebih kuat dan inklusif di masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut, disampaikan Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN-HN.04.03-1457 tertanggal 15 Oktober 2024, yang menjadi dasar pelaksanaan Paralegal Justice Award Tahun 2025.

Ahmad Shohib Zaeni, S.H., M.Kn., M.M., dari Bagian Hukum Kabupaten Magelang menjelaskan secara mendalam tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya peran Kepala Desa/Lurah dalam membantu masyarakat miskin dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap memiliki akses keadilan melalui pendampingan hukum yang layak.



SOSIALISASI PARALEGAL JUSTICE AWARDS DAN WILOKA LEGAL CULTURE

Selain itu, sesi ini juga menghadirkan Icha, seorang alumni Paralegal Justice Award 2024 dari Desa Somokaton, yang berbagi pengalaman berharga terkait proses persiapan dan administrasi dalam mengikuti kompetisi tersebut. Icha menjelaskan langkah-langkah praktis yang diperlukan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga strategi keberhasilan dalam mempersiapkan tim desa untuk berpartisipasi. Nurwita Kusumaningrum, S.H., M.H., perwakilan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, memberikan paparan komprehensif terkait dokumen administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta Paralegal Justice Award 2025. Penjelasan ini mencakup persyaratan teknis dan prosedural untuk memastikan keikutsertaan peserta berjalan lancar.

Kegiatan sosialisasi ini menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh Kepala Desa/Lurah dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kabupaten Magelang dalam ajang Paralegal Justice Award 2025. Para Kepala Desa/Lurah diimbau untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta dan mempersiapkan dokumen administrasi yang diperlukan. Dokumen tersebut mencakup berbagai bentuk dokumentasi, seperti foto, video, atau dokumen kesepakatan perdamaian yang menunjukkan upaya penyelesaian masalah hukum di tingkat desa. Dokumentasi ini tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga menjadi bukti konkret peran serta desa dalam menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat. Kesiapan administrasi dan komitmen dari para Kepala

Selain Kepala Desa/Lurah, Camat di seluruh Kabupaten Magelang juga diminta untuk berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum di wilayahnya dan berpartisipasi aktif dalam penghargaan Wiloka Legal Culture. Para camat diimbau untuk berkolaborasi dengan Kepala Desa/Lurah di wilayahnya dalam mempersiapkan program-program yang inovatif, seperti edukasi hukum berbasis komunitas, pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum). Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk meraih penghargaan sekaligus menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dan inklusif di tingkat desa dan kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG MERAHAIH KKP HAM 2024

Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kepada Azis Amin Mujahidin, Staf Ahli Bupati Magelang Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang. Acara penghargaan berlangsung dalam Puncak Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Acara ini adalah acara besar untuk memberikan apresiasi bagi kabupaten / kota yang dinilai berhasil melaksanakan program dalam mewujudkan kemajuan HAM yang merata diseluruh Indonesia. Tugas ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar setiap insan manusia mendapatkan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia.

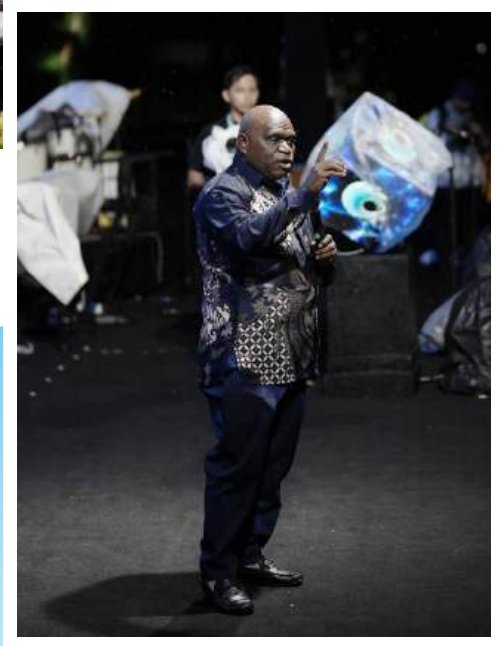
Puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke 76 telah diselenggarakan meriah di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 10 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Iza Mahendra, para Menteri, para komisioner, para deputi, Gubernur, Bupati Walikota penerima penghargaan KKP HAM seluruh Indonesia serta para Pimpinan Eselon I Jajaran Kemenkum dan Kemenimipis. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan IM, Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya mengajak seluruh pihak untuk tidak terbelenggu oleh persoalan HAM di masa lalu, namun lebih fokus pada upaya membangun masa depan yang lebih baik. Dengan tema "Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045", perayaan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya isu HAM.



"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan saya sebagai Pembela Hak Asasi Manusia terjadi sesuatu seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan bangsa Indonesia yang telah menghadirkan kementerian ini. Hari ini, komunitas hak asasi manusia berdiri tegak dan tidak lagi berada di pinggiran,"

Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H.,M.Sc

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Indonesia



Di lain sisi, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Piga dalam sambutannya, menyampaikan dengan tegas bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia kali ini dirayakan dengan semangat yang luar biasa di Indonesia. hal ini merupakan terobosan baru dan langkah awal yang baik didalam apresiasi penegakan HAM. Dia juga menambahkan untuk acara di tahun depan, semua tingkat baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dipastikan akan lebih meriah lagi supaya semua bersemangat untuk meningkatkan lagi kemajuan Hak Asasi Manusia di setiap sudut wilayah di Indonesia.



"Sepanjang perjalanan hidup dan karier saya, baru kali ini saya menyaksikan peringatan Hari Hak Asasi Manusia dirayakan dengan semangat yang begitu gegap gempita"

NATALIUS PIGA
 Menteri Hak Asasi Manusia

Oleh karena itu, acara ini menjadi tonggak baru bagi perayaan hak asasi manusia di Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa niat pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia di tingkat nasional maupun internasional tidaklah main-main. ini memberikan bukti nyata dalam langkah pasti Indonesia menuju sukses menjadi negara yang baik dalam penegakan HAM.



SOGOK AKU KAU KUTANGKAP

Pengarang: Haidar Musyafa

Penerbit: Emania

Tahun Terbit: 2017

Tebal Halaman: 434 halaman

Sogok Aku Kau Kutangkap merupakan buku yang menggambarkan prinsip, pengalaman, dan pandangan hidup Artidjo Alkostar sebagai seorang hakim agung yang terkenal dengan integritas dan ketegasannya. Buku ini menjadi semacam memoar yang mengisahkan perjuangan seorang penegak hukum melawan korupsi dan praktik curang dalam sistem peradilan. Judulnya yang provokatif mencerminkan sikap tak kenal kompromi Artidjo terhadap penyuapan, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia hukum Indonesia.

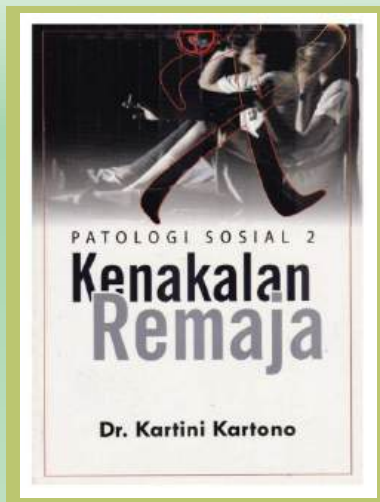
Buku ini tidak hanya berisi cerita perjuangan pribadi Artidjo, tetapi juga mengupas kasus-kasus penting yang pernah ditanganinya. Ia membagikan bagaimana ia memutuskan perkara-perkara besar dengan mempertimbangkan keadilan, etika, dan hukum. Tak ketinggalan, buku ini juga menyampaikan kritik tajam terhadap sistem hukum yang kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Melalui Sogok Aku Kau Kutangkap, Artidjo Alkostar mengingatkan bahwa integritas adalah senjata utama dalam melawan korupsi. Sikap tegas terhadap pelanggaran hukum harus menjadi standar yang dipegang teguh oleh setiap individu, terutama mereka yang berada di sektor penegakan hukum. Buku ini sangat direkomendasikan bagi mahasiswa hukum, praktisi peradilan, dan siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi oleh seorang hakim berintegritas. Pembaca akan mendapatkan inspirasi tentang bagaimana menghadapi tekanan dan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan.

Kelebihan Buku

1. Inspiratif: Buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana seorang individu yang berpegang teguh pada prinsipnya dapat menghadapi godaan materi dan tekanan politik.
2. Menggugah Kesadaran: Dengan gaya bahasa yang lugas, Artidjo mampu menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya integritas dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam profesi hukum.
3. Konteks Kasus Nyata: Penulis menyajikan beberapa kasus besar yang memberikan pelajaran moral dan profesional kepada pembaca, terutama mereka yang bergelut di dunia hukum.

Kekurangan Buku

1. Gaya Narasi yang Berat: Bagi pembaca awam, beberapa bagian buku mungkin terasa berat karena banyaknya istilah hukum yang digunakan tanpa penjelasan lebih lanjut.
2. Fokus pada Karier: Buku ini lebih banyak membahas pengalaman profesional Artidjo, sehingga sisi personalnya kurang terdali secara mendalam.



Patologi Sosial 2: KENAKALAN REMAJA

Penulis: Kartini Kartono

Penerbit: Rajawali Pers

Tahun Terbit: 2009

Tebal Halaman: 144 halaman

Buku "Patologi Sosial: Kenakalan Remaja" membahas secara mendalam tentang fenomena kenakalan remaja sebagai bagian dari patologi sosial, yaitu studi mengenai perilaku menyimpang dalam masyarakat. Penulis memaparkan berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perilaku agresif, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, pencurian, dan tindak kekerasan. Buku ini juga mengulas penyebab mendasar dari perilaku menyimpang tersebut, baik dari sudut pandang individu maupun lingkungan sosial.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kenakalan remaja bukan hanya masalah individu, tetapi juga cerminan dari kondisi sosial masyarakat. Faktor-faktor seperti keluarga yang disfungsi, lingkungan pergaulan yang buruk, tekanan ekonomi, dan lemahnya kontrol sosial menjadi penyebab utama yang diuraikan dalam buku ini. Selain itu, buku ini memberikan rekomendasi praktis tentang bagaimana masyarakat, khususnya keluarga, sekolah, dan pemerintah, dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja.

Kelebihan Buku

1. Pendekatan Multidisipliner: Penulis menggabungkan teori-teori sosiologi, psikologi, dan kriminologi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh.
2. Bahasa yang Mudah Dipahami: Meskipun membahas isu-isu yang kompleks, buku ini disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca awam maupun akademisi.
3. Relevansi Praktis: Buku ini memberikan wawasan yang aplikatif untuk orang tua, guru, dan pembuat kebijakan dalam menangani masalah kenakalan remaja.

Kekurangan Buku

1. Konteks yang Terkadang Terbatas: Beberapa analisis lebih relevan untuk kondisi masyarakat tertentu, sehingga pembaca dari latar belakang budaya berbeda mungkin perlu menyesuaikan interpretasinya.
2. Referensi yang Kurang Mutakhir: Jika dibandingkan dengan isu-isu kenakalan remaja yang terus berkembang, seperti cyberbullying atau kecanduan media sosial, beberapa materi dalam buku ini mungkin memerlukan pembaruan.



ARTIDJO, SANG PENDEKAR HUKUM

Artidjo Alkostar adalah salah satu figur yang melegenda dalam dunia hukum di Indonesia. Selama menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA), Artidjo dikenal sebagai sosok yang tegas, berintegritas, dan tanpa kompromi terhadap kasus-kasus korupsi yang ditanganinya. Dalam perjalanan kariernya, ia menjadi simbol keberanian di tengah sistem hukum yang sering kali dipertanyakan integritasnya. Lahir di Situbondo, Jawa Timur, pada 22 Mei 1948, Artidjo menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebelum melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Kehidupannya yang sederhana dan dedikasinya terhadap keadilan menjadi teladan bagi generasi muda

Sebagai hakim agung, Artidjo dikenal tidak segan-segan memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi. Di tangan Artidjo, para koruptor kerap menghadapi vonis yang lebih berat daripada yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama atau banding. Sikap tegasnya ini membuatnya disegani sekaligus menjadi momok bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Tak jarang, ia menerima ancaman dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh keberaniannya. Meski begitu, Artidjo tetap teguh pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

SIntegritas Artidjo tidak hanya terlihat dalam putusannya, tetapi juga dalam gaya hidupnya. Selama bertugas di Mahkamah Agung, ia menjalani hidup sederhana tanpa terpengaruh oleh godaan materi. Banyak yang menyebutnya sebagai "hakim tanpa cela" karena rekam jejaknya yang bersih dari korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Kehidupan sederhana yang dijalani Artidjo mencerminkan komitmennya untuk menjadi teladan dalam dunia peradilan.

Sebelum menjadi hakim agung, Artidjo sempat mengabdikan diri sebagai pengacara. Ia dikenal sering membela rakyat kecil dan menjadi advokat bagi mereka yang tidak mampu. Pengalaman ini membentuk kepekaannya terhadap ketidakadilan sosial, yang kelak mewarnai putusan-putusan tegasnya di Mahkamah Agung. Artidjo percaya bahwa hukum harus menjadi alat untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan, bukan menjadi alat penindas.

Selain sebagai pengacara dan hakim, Artidjo juga pernah menjadi dosen hukum. Dalam perannya sebagai pendidik, ia sering menyampaikan pentingnya etika dan integritas dalam profesi hukum. Ia berpesan kepada mahasiswa hukumnya untuk tidak tergiur oleh uang atau kekuasaan yang dapat merusak prinsip-prinsip keadilan. Sebagai seorang akademisi, Artidjo memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi baru penegak hukum yang berintegritas.



Artidjo juga dikenal sebagai pribadi yang religius. Sebagai seorang Muslim, ia menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Sikap ini terlihat dalam cara ia memandang hukum sebagai instrumen yang harus dijalankan dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Dalam berbagai kesempatan, Artidjo menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepergian Artidjo pada 28 Februari 2021 meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak. Ia meninggal dunia pada usia 72 tahun setelah menderita sejumlah penyakit. Meskipun telah tiada, warisan moral dan integritasnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Indonesia. Banyak yang berharap bahwa nilai-nilai yang ditanamkan Artidjo akan terus menjadi inspirasi bagi para penegak hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, Artidjo adalah simbol perlawanan terhadap korupsi. Dedikasinya dalam menegakkan keadilan menunjukkan bahwa seorang individu dapat memberikan dampak besar meskipun menghadapi tantangan besar. Dengan keteguhannya, ia telah membuktikan bahwa integritas adalah kekuatan utama yang dapat mengubah wajah peradilan. Di tengah tantangan besar yang dihadapi sistem hukum Indonesia, kisah hidup Artidjo Alkostar menjadi pengingat bahwa harapan untuk peradilan yang adil dan bersih masih ada. Sosoknya menjadi bukti bahwa keberanian dan komitmen pada prinsip-prinsip keadilan mampu melampaui berbagai hambatan. Generasi muda diharapkan dapat melanjutkan perjuangannya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik.

Artidjo Alkostar akan selalu dikenang sebagai salah satu pahlawan hukum Indonesia. Dengan segala kontribusinya, ia telah menorehkan sejarah yang akan terus menjadi inspirasi bagi bangsa ini. Keberanian, integritas, dan dedikasinya menjadi pelajaran berharga bahwa keadilan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan tanpa kenal lelah

KONSULTASI PUBLIK RAPERBUP PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Magelang baru-baru ini mengadakan Konsultasi Publik untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Acara yang dipimpin oleh Ruswanto, Penyuluh Hukum Ahli Muda, dan Ahmad Shohib Zaeni, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum ini bertujuan untuk menjangkau masukan dari berbagai pihak agar Raperbup yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsultasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Fatmawati, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi, dan organisasi profesi advokat, termasuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Keberagaman peserta mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, LBH, dan organisasi profesi advokat dalam memastikan implementasi Perda berjalan dengan baik dan efektif.

Dalam sambutannya, Ruswanto menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunan Raperbup. Menurutnya, masukan dari berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Ia menyatakan bahwa konsultasi publik ini adalah langkah strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Kabupaten Magelang..

Ahmad Shohib Zaeni, sebagai salah satu pemateri, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya perluasan akses keadilan melalui Raperbup ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari Perda Nomor 8 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam proses ini, LBH dan organisasi profesi advokat memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan hukum

LBH yang hadir dalam acara ini juga memberikan masukan terkait kendala teknis yang sering mereka hadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum di lapangan. Mereka mengusulkan adanya sistem pendukung yang lebih baik, seperti penyediaan anggaran yang memadai dan pelatihan paralegal untuk membantu memperluas cakupan layanan hukum. Masukan ini menjadi salah satu poin penting yang diharapkan dapat diakomodasi dalam penyusunan Raperbup. Selain itu, perangkat daerah yang hadir menekankan pentingnya sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat mengenai adanya program bantuan hukum ini. Mereka mengusulkan agar informasi mengenai mekanisme pengajuan bantuan hukum dapat disebarluaskan melalui media yang mudah diakses, seperti media sosial, brosur, atau kegiatan sosialisasi langsung ke desa-desa. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui hak mereka, tetapi juga memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan hukum.



KONSULTASI PUBLIK RAPERBUP
PERATURAN PELAKSANAAN PERDA 8-2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pemerintah Kabupaten Magelang berharap dengan adanya Raperbup ini, pelaksanaan bantuan hukum dapat lebih terarah dan efektif. Mereka menargetkan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok rentan, dapat merasakan manfaat langsung dari program bantuan hukum ini. Dukungan dari LBH dan organisasi profesi advokat dinilai sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dengan berlangsungnya konsultasi publik ini, diharapkan Raperbup yang dihasilkan benar-benar matang dan sesuai aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas akses keadilan bagi seluruh warganya. Proses partisipatif ini menjadi langkah penting untuk menciptakan peraturan yang inklusif, responsif, dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

KADES SOMOKATON, KAB. MAGELANG RAIH PENGHARGAAN



Kepala Desa Somokaton, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, mencatat prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan bergengsi di acara Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2024. Acara ini berlangsung pada Sabtu, 1 Juni 2024, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, dan dihadiri oleh para tokoh serta perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Awalnya, acara ini direncanakan berlangsung di Grand Sahid Hotel, Jl. Jenderal Sudirman, namun kemudian dipindahkan ke Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kendati ada perubahan lokasi, acara tetap berlangsung meriah, penuh antusiasme, dan sukses mengapresiasi para pemimpin desa yang telah berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum di wilayahnya.

Pada malam penghargaan tersebut, Kepala Desa Somokaton berhasil meraih gelar Non Litigation Peacemaker (NL.P) setelah menyelesaikan program Paralegal Academy. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas kemampuan paralegalnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara damai, tanpa melalui jalur litigasi. Gelar NL.P adalah simbol kompetensi dan pengakuan atas peran kepala desa dan lurah yang mampu memberikan solusi hukum efektif di tingkat lokal. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana pendekatan non-litigasi mampu menciptakan suasana damai dan meningkatkan harmoni di masyarakat desa.

Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Sebanyak 50 kepala desa dan lurah terbaik se-Indonesia menerima penghargaan atas dedikasi mereka dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Penghargaan ini menyoroti peran penting kepala desa sebagai pemimpin lokal yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara damai dan mendukung ketertiban hukum di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan lebih banyak aktor penyelesaian sengketa di tingkat desa.

Dalam sambutannya, BPHN mengapresiasi kontribusi para kepala desa dan lurah yang berhasil menciptakan desa-desa yang aman, tertib, dan sadar hukum. Melalui penghargaan ini, diharapkan semakin banyak pemimpin lokal yang termotivasi untuk menjadi pelopor penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Para kepala desa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai "hakim perdamaian," memberikan alternatif penyelesaian hukum yang cepat, murah, dan berkeadilan. Keberhasilan para penerima penghargaan ini menjadi bukti nyata pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial.

Keberhasilan Kepala Desa Somokaton menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk meningkatkan kompetensi dalam penyelesaian sengketa. Desa Somokaton telah menunjukkan bagaimana pendekatan non-litigasi tidak hanya menjadi solusi praktis, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokalnya. Dengan strategi yang tepat, desa-desa lain di Kabupaten Magelang diharapkan dapat meniru keberhasilan ini, menciptakan harmoni di masyarakat, dan memperluas jangkauan akses hukum.



**KADES SOMOKATON RAIH PENGHARGAAN
NON LITIGATION PEACEMAKER DALAM AJANG
PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2024**

Kabupaten Magelang sebagai wilayah asal Kepala Desa Somokaton diharapkan dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan ini. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih besar bagi desa-desa dalam mengembangkan program hukum berbasis masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya hukum yang memadai. Dengan langkah ini, desa-desa di Kabupaten Magelang dapat memperkuat perannya dalam menciptakan keadilan sosial.

Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa komitmen dan kerja keras dalam menciptakan lingkungan hukum yang baik dapat memberikan hasil yang membanggakan. Kepala Desa Somokaton telah menunjukkan bahwa peran pemimpin lokal sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan semangat yang sama, diharapkan lebih banyak pemimpin desa di Indonesia yang terinspirasi untuk terus berkontribusi dalam menciptakan harmoni di masyarakat melalui pendekatan hukum yang damai dan inklusif.

PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM PERLU DIPERLUAS LAGI



Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang telah berhasil menggelar acara bertajuk “Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Sadar Hukum” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa. Acara ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun komunitas yang memahami, menghormati, dan taat pada hukum. Pembentukan desa sadar hukum ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam mengelola masalah hukum serta menjadi teladan bagi desa-desa lainnya.

Kegiatan ini mengundang sejumlah narasumber berpengalaman dari berbagai institusi, seperti DPRD Kabupaten Magelang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Polresta Kabupaten Magelang, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari desa-desa di Kabupaten Magelang. Kehadiran mereka memberikan perspektif yang beragam mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadilan. Para narasumber juga memberikan pemaparan mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.



Dalam sambutannya, perwakilan dari Bagian Hukum menyampaikan bahwa kesadaran hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan pemahaman hukum yang memadai, masyarakat tidak hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di lingkungannya.

Para narasumber menekankan pentingnya masyarakat memahami prosedur hukum, terutama dalam konteks keluarga, seperti pembagian harta warisan, pengelolaan aset, dan penyelesaian konflik antaranggota keluarga. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat menghindari konflik yang lebih besar di masa depan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan berdaya dalam mengatasi masalah hukum secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga hukum.



Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat terlihat. Banyak dari peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman mengenai masalah hukum yang mereka hadapi sehari-hari. Diskusi interaktif ini menjadi momen penting untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan aturan administratif lainnya. Pada sesi diskusi, beberapa tokoh masyarakat juga berbagi pandangan mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum. Mereka mengusulkan agar pemerintah dan lembaga hukum lebih sering mengadakan kegiatan semacam ini untuk menjangkau lebih banyak desa. Dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi berbagai pihak, pembinaan desa sadar hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang luas.

Di akhir acara, dilakukan sesi tanya jawab yang interaktif. Pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai topik, mulai dari prosedur penyelesaian sengketa tanah hingga perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Para narasumber memberikan penjelasan yang rinci dan aplikatif, sehingga masyarakat tidak hanya memahami hukum secara teori tetapi juga cara praktis untuk menerapkannya dalam situasi nyata.



PENGUATAN SINERGITAS PERANGKAT DAERAH DI BIDANG HUKUM

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum di Grand Artos Hotel & Convention. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, seperti Pj. Bupati Magelang, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan, Direktur RSUD, Kepala Bagian, dan para camat se-Kabupaten Magelang. Dengan tema “Penguatan Sinergitas Perangkat Daerah dalam Pelayanan Bidang Hukum”, rapat ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Selain itu, acara ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perangkat daerah demi mewujudkan kepastian hukum yang adil dan teratur.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Magelang, Sepyo Achanto, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang didukung oleh Peraturan Bupati (Perbup). Ia menyampaikan bahwa produk hukum daerah harus dirancang sesuai prinsip tertib regulasi, mulai dari aspek kewenangan hingga implementasi. Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, keberhasilan suatu aturan hukum ditentukan oleh sinergi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Sepyo menekankan bahwa Perda dan Perbup tidak hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua perangkat daerah untuk memahami dan melaksanakan peraturan dengan cermat.

Lebih lanjut, Pj. Bupati berharap agar rapat ini mampu memperkuat kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan di bidang hukum. Kolaborasi ini dianggap penting untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari masalah hukum. Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memahami perannya dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Sepyo menyatakan komitmennya untuk terus mendorong integrasi dan sinergi antarinstansi, sehingga seluruh produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kepentingan publik.



Pada sesi Diskusi Panel, Sekretaris Daerah Adi Waryanto menyampaikan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang memuat amanat pasal-pasal untuk ditindaklanjuti. Ia menyebutkan bahwa beberapa Perda masih membutuhkan tindak lanjut berupa penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) agar implementasinya lebih jelas dan terarah. Adi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan proses tindak lanjut tersebut. Ia menegaskan bahwa keterlambatan dalam menyusun atau melaksanakan regulasi dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara OPD menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, Ratna Yulianty, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam menyusun produk hukum yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Hukum dalam setiap tahap penyusunan peraturan daerah. Ratna juga mengimbau perangkat daerah untuk tidak ragu mendiskusikan permasalahan hukum yang dihadapi. Menurutnya, konsultasi yang baik akan menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas tetapi juga mampu menjawab tantangan di lapangan.

Ratna juga menambahkan bahwa Bagian Hukum siap memberikan dukungan penuh kepada perangkat daerah yang menghadapi permasalahan hukum. “Bagi OPD yang memiliki permasalahan hukum, jangan ragu untuk datang ke Bagian Hukum. Kami siap melayani dan membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang tepat,” tegasnya. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan kepastian hukum sangat bergantung pada kemitraan yang solid antara OPD dan Bagian Hukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum di Kabupaten Magelang.




14 MEI 2024


PEMBAHASAN TIGA RAPERDA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang menyelenggarakan pertemuan penting untuk memaparkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Penjabat (Pj) Bupati Magelang, Sepyo Achanto, S.H., M.H. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Cemerlang dan dipimpin langsung oleh Pj. Bupati. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai tiga Raperda yang sedang disusun guna mendapatkan arahan strategis dari pimpinan daerah. Dengan mengundang para kepala perangkat daerah terkait, forum ini menjadi sarana penting untuk menyatukan pemahaman dan menyelaraskan visi pembangunan daerah.

Tiga Raperda yang menjadi fokus pembahasan mencakup topik strategis untuk pembangunan daerah. Pertama, Raperda tentang Penanaman Modal, yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054, yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Ketiga, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang menjadi panduan strategis pembangunan selama dua dekade ke depan. Ketiga Raperda ini diharapkan menjadi landasan penting bagi pembangunan Kabupaten Magelang.

Dalam arahannya, Pj. Bupati Magelang menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan pengkajian Raperda. Ia menegaskan bahwa setiap Raperda harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kondisi aktual Kabupaten Magelang. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya relevan tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Arahan ini menjadi pedoman penting bagi tim penyusun dalam menyempurnakan draft Raperda

Dalam pertemuan ini, masing-masing kepala dinas terkait mempersiapkan materi paparan yang komprehensif. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbangda) menjadi aktor utama dalam penyampaian materi. Mereka menjelaskan latar belakang, dasar hukum, muatan materi, aspek strategis, dan relevansi muatan lokal dari masing-masing Raperda. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap Raperda memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas regulasi dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap Raperda yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara komprehensif. Raperda tentang Penanaman Modal, misalnya, diharapkan dapat mendorong investasi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sementara itu, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim menjadi fokus utama. Dengan jangka waktu perencanaan hingga tahun 2054.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan komitmennya untuk menciptakan regulasi yang berkualitas dan relevan dengan kondisi aktual. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, Kabupaten Magelang diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan di masa depan dengan lebih optimis. Raperda yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman strategis tetapi juga alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



**PAPARAN RAPERDA KEPADA Pj BUPATI
PENANAMAN MODAL, RPPLH TAHUN 2024-2054 DAN
RPJPD TAHUN 2025-2045**

RP3KP UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN



Segala sesuatu yang menyangkut masalah publik, terutama permukiman dan perumahan, harus direncanakan dengan cermat. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. Untuk itu, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Magelang menggelar tahapan kegiatan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) antara lain Konsultasi publik, Rapat Pembahasan, Rapat Harmonisasi, Rapat Paparan Raperda RP3KP.

Konsultasi publik terkait Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) bertujuan untuk melibatkan masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Partisipasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui konsultasi ini, berbagai masukan, kritik, dan saran dapat diperoleh untuk memperkuat landasan penyusunan Raperda. Diharapkan, kebijakan yang dirumuskan nantinya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta mendukung pembangunan kawasan permukiman yang layak, nyaman, dan berkelanjutan.

Selain itu, konsultasi publik juga menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama terkait visi pembangunan yang ingin dicapai. Dengan pendekatan ini, Raperda RP3KP diharapkan menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Magelang menuju kondisi yang lebih baik, sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) bertujuan untuk merencanakan dan mengembangkan kawasan permukiman yang layak di Kabupaten Magelang. Proses ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait sebagai upaya menciptakan koordinasi yang baik dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan kawasan permukiman yang tidak hanya memadai secara infrastruktur tetapi juga mendukung kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berperan sebagai penyelenggara, memfasilitasi diskusi dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draft Raperda.



Perangkat daerah yang terlibat dalam rapat ini meliputi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbangda (Bappeda dan Litbangda), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga turut memberikan kontribusi. Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan PK) serta Bagian Administrasi Pembangunan melengkapi sinergi antarinstansi. Partisipasi lintas sektor ini menunjukkan pentingnya kerja sama dalam menyusun kebijakan yang komprehensif dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang.

Dalam rapat tersebut, setiap perangkat daerah memberikan masukan dan pandangan berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. DPRKP, misalnya, fokus pada kebutuhan dan kriteria perumahan yang layak, sementara DPUPR memberikan pandangan terkait penataan ruang. DLH menyoroti aspek lingkungan yang mendukung keberlanjutan, dan Diskominfo berkontribusi dalam aspek teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Masukan dari Bappeda dan Litbangda menjadi dasar dalam memastikan kebijakan ini selaras dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan BPBD menekankan pentingnya mitigasi risiko bencana di kawasan permukiman. Semua masukan ini menjadi dasar penting dalam menyusun Raperda yang menyeluruh dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat Harmonisasi Raperda Rp3kp Dan Trantibumlinmas bertujuan untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah (Raperda) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Dalam penyusunan Raperda, harmonisasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui upaya harmonisasi ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap Raperda yang disahkan memiliki efektivitas dalam pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Magelang. Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang. Selain itu, keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menambah nilai strategis dalam proses ini. Kemenkumham berperan penting dalam memastikan bahwa kedua Raperda ini telah sesuai dengan peraturan hukum di tingkat pusat maupun daerah. Kehadiran mereka memastikan tidak ada potensi konflik norma dalam pelaksanaan regulasi tersebut.



Selanjutnya Paparan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RP3KP dan Trantibumlinmas dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Drs. Adi Waryanto, didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Ratna Yulianty, S.H.,M.H. serta mengundang berbagai instansi untuk memberikan pandangan dan masukan guna menyempurnakan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Sekretaris Daerah, Adi Waryanto, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi untuk memastikan Ranperda yang dibahas dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan kolaborasi yang solid antarinstansi. Dalam forum ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya untuk merancang kebijakan yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan mampu menghasilkan Ranperda yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang.



JARINGAN
DOKUMENTASI
HUKUM
DAN
INFORMASI
HUKUM

Nepal Van Java



Dusun Butuh, Desa Temanggung,
Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

Objek Wisata
Kabupaten Magelang